



Media Title	Kompas		
Head Line	Ketika Kota Usai Berpesta		
Date	9 Okt 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	33	Article Size	
Journalist	Wer/Bay/AHA/Mar	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

# Ketika Kota Usai Berpesta

**Mobil mewah berseliweran di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang jalannya pendek-pendek. Pesawat jet pribadi bertaburan di beberapa tempat di Kalimantan Selatan. Segelintir warga menikmati kemewahan itu. Di sisi lain, kemiskinan menggantung di pinggir kota-kota itu. Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan juga memiliki masalah sendiri. Pesta sudah hampir usai, tetapi sepertinya mereka tidak menyadarinya.**

**T**im Ekspedisi Sabang-Merauke mengunjungi beberapa titik di Kalimantan. Pulau ini lebih dekat dengan sebutan pulau eksploitasi. Kenyataan itu tak terbantahkan, dan suka atau tidak suka memang seperti itu. Semua penduduk Indonesia tahu Kalimantan kaya akan hasil alam dan tambang. Namun, semua juga tahu kekayaan itu tidak menjejatarkan warganya.

Tidak perlu jauh-jauh mencari contoh bagaimana Kalimantan tidak mengurus dirinya sendiri. Soal infrastruktur, misalnya. Dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara), yang merupakan pemekaran Kaltim, jalan yang mulus hanya ruas Balikpapan-Samarinda sepanjang 120 kilometer.

Ruas jalan itu pun tak bisa dibilang sempurna karena lubang di sana-sini dan banyak titik yang bergelombang. Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang notabene bertangga pun, warganya repot jika saling mengunjungi. Hanya bisa naik kapal feri.

Jika membawa mobil, warga Penajam harus membayar Rp 200.000 untuk sekali menyeberang Teluk Balikpapan. Jika menempuh perjalanan darat harus melahap jalan sepanjang 100-an km yang penuh dengan lubang, melewati Sambaaja yang merukan wilayah Kabupaten Kutai

udara, Kalimantan bagaikan anak tiri. Antaribu kota provinsi se-Kalimantan saja belum juga tersambung. Bayangkan saja, warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang akan bepergian ke Balikpapan, misalnya, harus naik pesawat dulu ke Jakarta.

Sudah sekian kali daerah-daerah di Kalimantan berganti gubernur, bupati, dan wali kota, tetapi rasanya belum terhubung karena kondisi jalan yang buruk. Namun, di sisi lain, ruas jalan tampaknya tidak terlalu dipikirkan karena Kalimantan memilih menggarap aneka megaprojek dan menguras sumber daya alam (SDA) tanpa kontrol.

Satu megaprojek yang dikritik, yakni jalan tol Balikpapan-Samarinda sejauh 99 km yang total menelan anggaran Rp 6,2 triliun. Pemerhati lingkungan memprotes jalan tol itu karena melintasi dua kawasan konservasi, yakni Hutan Lindung Sungai Manggar dan Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto. Namun, pembangunan tol tetap diteruskan karena divestui pemerintah pusat.

Ya, Kalimantan hanya bisa membangun tanpa merawat. Masyarakat masih ingat, banyak arena bekas PON 2008 di sejumlah kota yang kini telantar, misalnya Kompleks Stadion Utama Kaltim di Palaran, Samarinda, yang pembangunannya menghabiskan Rp 1 triliun. Sayangnya, stadion sepak bola di sana pun kini kondisinya mengangur. Menjadi ironis karena di satu sisi, Balikpapan, kota tetangga Samarinda, berjuang membangun satu stadion sepak bola.

Untuk urusan pengerukan SDA, Kalimantan tempatnya. Setelah kayu menuju habis, dimulailah era pengerukan batubara yang semakin menghebat di era

3,7 juta hektar dan negara Swiss 4,1 juta hektar. Tentu saja tidak semua luas konsesi ini bisa ditambang. Namun, gambaran itu pun sudah mencengangkan. Semakin menyakitkan ketika lebih dari 90 persen batubara yang dikeruk itu diekspor, sementara listrik di Kaltim masih byarpet.

Dalam rencana pembangunan jangka menengah Kaltim 2009-2013 telah ditetapkan visi Kaltim Bangkit 2013, yakni mewujudkan Kaltim sebagai pusat agroindustri dan energi terkemuka menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Visi itu selaras dengan tema pembangunan koridor ekonomi Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.

Hal itu disampaikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam sambutan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Balikpapan, Kaltim, Oktober 2012, pada peresmian dan *ground breaking* proyek-proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) di Kaltim.

Dari sana jelas tercermin bahwa Kaltim akan terus dikeruk sumber alamnya. Awang pun kala itu menyebutkan, harapan Kaltim ke depan adalah pemancangan fondasi proyek-proyek MP3EI lainnya, antara lain pembangunan terminal batubara di Pulau Miang Besar, Kutai Timur.

Ketidakpuasan atas apa yang dilakukan pemprov dan pemkab sudah tertanam bertahun-tahun. Tak heran ketika beberapa pihak menyuarakan pemekaran karena merasakan ketidakadilan pembangunan dan perhatian. Seperti wacana Kabupaten Kutai Pesisir yang jika jadi akan "mengambil" lima kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang kaya akan migas karena di sana lokasi ladang migas Delta Mahakan.

Agaknya sulit dipercaya, tapi Kabupaten Kukar yang memasok triliunan rupiah per tahun untuk negara hanya dari tambang dan migas ini justru paling banyak penduduk miskinnya. Contoh paling gampang dilihat, jumlah penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)—program kompensasi kenaikan harga BBM tahun 2013—di Kukar mencapai 27.256 rumah tangga sasaran. Jumlah ini terbanyak se-Kaltim, mengungguli 13 kabupaten/kota se-Kaltim dan Kaltara.

Di Kalimantan Selatan masalahnya juga tidak jauh beda. Pe-

lamsi bekas galian yang masih cukup kecil dan adanya tumpang tindih lahan pada sisi yang lain. Banyak perusahaan, terutama pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak melakukannya. Berbagai alasan dikemukakan, tetapi reklamasi tetap tak dijalankan. Akhirnya yang terlihat hanya bekas-bekas galian berukuran raksasa yang menganga begitu saja dan sebagian terisi air menjadi danau-danau buatan. Pemandangan seperti ini fampak di daerah-daerah penghasil tambang, seperti Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Tanah Laut.

Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki masalah tersendiri. Investasi kebun sawit memunculkan konflik antara perusahaan dan masyarakat. Saat ini terdapat lahan sawit sekitar 800.000 hektar yang sudah berproduksi di Kalbar. Masalah yang muncul mulai dari penyerobotan lahan dan bagi hasil dengan petani.

Masalah itu muncul di hampir semua kabupaten. Kerusakan lingkungan juga sudah terlihat. Di beberapa areal perkebunan lahan mengalami kekeringan sehingga petani sulit mendapat air. Sebelumnya para petani mudah mendapat air karena lahan sebelum sawit merupakan hutan sekunder.

Jika direntang lebih jauh lagi, seperti masalah-masalah perbatasan, negara seolah tidak hadir. Ketika masyarakat di Pulau Jawa meneriakkan ketidakpuasan atas Malaysia, orang Indonesia di perbatasan—pedalaman Kaltara dan Kalbar—hanya bisa membeli sejumlah kebutuhan dari negara tetangga itu.

Sebatik, pulau terluar di Kaltara yang berbatasan darat dengan Indonesia, juga menampakkan wajah bagaimana negara belum hadir di perbatasan. Sebatik wilayah Malaysia di malam hari terang, sedangkan Sebatik wilayah Indonesia masih belum terang, apalagi terang benderang.

Itu juga wajah Kalimantan. Ada yang mendapat penghidupan di sana, tapi ada juga yang merana karena alam dikuras. Suatu saat pesta pasti berakhir, kota-kota itu perlu bersiap.

(WER/BAY/AHA/MAR)

**Ketidakpuasan atas apa yang dilakukan pemprov dan pemkab sudah tertanam bertahun-tahun.**

otonomi daerah. Untuk batubara misalnya, Jaringan Advokasi Tambang Kaltim—LSM yang peduli memantau isu tambang—mencatat luas konsesi tambang di wilayah Kaltim, dan Kaltara, mencapai 5,4 juta hektar.